



RENCANA KERJA (RENJA)

BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SELUMA

TAHUN 2025

Jl. Soekarno-Hatta No.01 Tais, Kab. Seluma, Bengkulu

Telp./fax. (0736) 9150034 Kode Pos 38576

Email : kesra_seluma@yahoo.com



KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Taupiq dan HidayahNya, sehingga kita telah dapat menyusun Rencana Kerja (RENJA) Bagian Kesejahteraan Rakyat yang didalamnya berisi Tugas Pokok dan Fungsi serta Rencana Program Kegiatan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma yang akan digunakan sebagai dasar Penyusunan RKPD Kabupaten Seluma Tahun 2024.

Penyusunan Rencana Kerja ini merupakan amanat UU 32 Tahun 2004, UU Nomor 25 Tahun 2004, UU Nomor 17 Tahun 2003, PerMDN 13/2006 j0 PerMDN 59/2007 dan PerMDN 54/2010. Melalui Proses dalam penyusunan maka Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat 2024 dapat diselesaikan.

Kepada semua pihak kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas partisipasi dan bantuannya sehingga Rencana Kerja ini dapat diselesaikan. Selanjutnya kami mohon kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat Tahun 2025.

Tais, Januari 2025

KEPALA BAGIAN
ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT,

H. SUPARDI, M.Pd
NIP. 49710543 199702 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar isi

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Dasar Hukum 1

1.3 Maksud dan Tujuan 1

1.4 Sistematika Penulisan 2

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renja 3

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 5

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD..... 6

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal SKPD 7

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 8

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 10

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 10

3.3 Program dan Kegiatan..... 10

BAB IV. PENUTUP..... 12

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah bagian Kesejahteraan Rakyat merupakan dokumen perencanaan kerja untuk periode satu tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dan kegiatan serta penggunaan anggaran keuangan Sekretariat Daerah bagian Kesejahteraan Rakyat dalam periode Tahun 2024. Dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah bagian Kesejahteraan Rakyat ini berfungsi sebagai acuan kerja bagi pelaksanaan kegiatan pada tahun bersangkutan. Sebagai dokumen rencana tahunan, Rencana Kerja Sekretariat Daerah bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat ;

- a. Rencana kerja merupakan dokumen yang secara substansial penerjemah dari visi, misi, dan program SKPD yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- b. Rencana Kerja merupakan acuan SKPD untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA, PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2023.
- c. Rencana Kerja merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Strategis telah tercapai.

Mengingat arti strategis dokumen rencana kerja dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahap penyusunan hingga penetapan dokumen rencana kerja harus mengikuti tatacara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, Tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang Rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah. Dokumen rencana kerja Sekretariat Daerah bagian Kesejahteraan Rakyat ini disusun untuk dapat mewujudkan tujuan dan melaksanakan sasaran dan kebijakan strategis yang telah tertuang dalam rencana strategis Sekretariat Daerah bagian Kesejahteraan Rakyat.

1. 2. Landasan Hukum

- Landasan Yuridis Formil yaitu UU Nomor 17 Tahun 2007 tanggal 5 Pebruari 2007 tentang RPJP Nasional 2005 – 2025 Pasal 8 Ayat (3) : RPJM Daerah yang telah ada masih tetap berlaku dan wajib dise suaikan dengan RPJP Nasional, paling lambat 6 (enam) bulan. Penjelasan : Ayat (3) : Untuk mengakomodasi RPJM Daerah yang telah ada, agar sesuaidengan RPJP Daerah yang telah disesuaikan dengan RPJP Nasional, maka RPJM Daerah substansinya perlu disesuaikan dengan RPJP Daerah tanpa harus menyesuaikan kurun waktu RPJM Daerah dengan RPJP Daerah maupun RPJM Nasional. Hal ini dikarenakan waktu pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah yang berbeda – beda tiap daerah.
- PP.No. 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Daerah.
- Implementasi PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah yang sudah diperdakan untuk Pemerintah Kota Manado yang perlu diantisipasi kerangka perencanaan dan penganggaran program kerjanya.
- PP No. 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Permendagri nomor 13 tahun 2006.
- UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 17 Tahun 2003, PerMDN No. 13 Tahun 2006 j0 PerMDN 59 Tahun 2007 dan PerMDN No 54 Tahun 2010.

1. 3. Maksud Dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah untuk menunjang Program Pemerintah dalam memonitoring Evaluasi dan Pelaporan Kesejahteraan Rakyat dibidang Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat.

1.4 Sistematika Penulisan Rencana Kerja

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2024 disusun dengan Sistematika Penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja agar substansi pada bab-bab Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Seluma berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1. 1. Latar Belakang

Memuat tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD dengan Renja.

1. 2. Landasan Hukum

Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum didalam penyusunan Renja Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma.

1. 3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.

1. 4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja SKPD Tahun lalu (Tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-2).

2. 1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu Dan Capaian Renstra SKPD

2. 2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2. 3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi SKPD

2. 4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2. 5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3. 1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3. 2. Tujuan Dan Sasaran Renja SKPD

3. 3. Program Dan Kegiatan

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2. 1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu Dan Capaian Renstra SKPD

Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma dalam Rencana Kerja Tahun 2024 telah melaksanakan pengkoordinasian dengan Instansi terkait mengenai isu-isu yang berdasarkan pada Grand Strategi Tahun 2011 – 2016 yaitu :

- ❖ Jumlah tokoh agama yang menjadi motivator hubungan harmonis antar agama dan umat agama
- ❖ Jumlah kegiatan hari-hari keagamaan
- ❖ Jumlah rumah ibadah yang mendapatkan bantuan pembangunan
- ❖ Jumlah jama'ah haji Kabupaten seluma
- ❖ Pelayanan Kesehatan di Lingkungan Setda Kab. Seluma.

a. Jumlah tokoh agama yang menjadi motivator hubungan harmonis antar agama dan umat agama.

Indikator ini memiliki target awal di tahun 2024 yaitu 100 Pemuka Agama yang akan mendapat dana hibah bantuan untuk pimpinan umat beragama, dapat terealisasi 100 % sesuai dengan target awal Tahun 2024.

Faktor penyebab terealisasinya target awal Tahun 2024 karena banyak tempat ibadah maupun pimpinan golongan agama telah sesuai dengan Peraturan Bupati Seluma Nomor 01 Tahun 2015, kenyataan di lapangan masih banyak tempat ibadah yang belum layak pakai dan permasalahan dalam denominasi agama masing – masing.

Untuk mengatasi permasalahan ini Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat telah melakukan sosialisasi dengan pimpinan tempat ibadah terkait persyaratan untuk menerima dana hibah bantuan untuk pimpinan umat beragama.

b. Jumlah kegiatan kebersamaan keagamaan

Indikator ini memiliki target awal di Tahun 2024 yaitu 2 kali ibadah/kegiatan kebersamaan keagamaan yang terdiri dari 2 kali ibadah rutin umat Islam.

Target dari indikator ini terlaksana dengan baik dengan persentase 100%. Dan perlu di ketahui bahwa dalam ibadah rutin untuk umat Islam di koordinir oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat, untuk umat Hindu dilaksanakan langsung oleh Panitia Umat Hindu di Kabupaten Seluma serta untuk umat Kristen dilaksanakan langsung oleh Panitia Umat Kristen di Kabupaten Seluma.

c. Jumlah rumah ibadah yang mendapatkan bantuan pembangunan

Indikator ini memiliki target awal di tahun 202 yaitu 100 % atau Rp.250.000.000,- untuk 100 masjid yang akan menerima bantuan. Untuk indikator ini Bagian Kesejahteraan Rakyat tidak dapat menjelaskan secara terperinci karena indikator ini masih dikelola oleh Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma dan kami kesulitan dalam memperoleh data tersebut.

Untuk mengatasi masalah ini Bagian Kesejahteraan Rakyat telah menyampaikan Telaahan Staf kepada Bapak Bupati Seluma agar Bagian Kesejahteraan Rakyat yang mengelola proses pemberian bantuan untuk rumah ibadah tersebut sehingga diharapkan tepat arah dan sasaran Masjid yang menerima bantuan.

d. Jumlah Jama'ah Haji Kabupaten Seluma

Untuk Tahun 2024 rencananya akan diberangkatkan 172 orang jamaah calon haji Kabupaten Seluma.

e. Pelayanan Kesehatan di lingkungan Perkantoran Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma

Tujuan Program ini adalah meningkatkan derajat Kesehatan ASN dan Honor-er di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma, khususnya yang dapat men-jangkau pelayanan Klinik Kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma. Sehing-ga akan meningkatkan kinerja ASN yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma. Keberadaan Klinik Kesehatan Pemda Seluma sangat bermanfaat bagi ASN Pemda Seluma dimana masalah kesehatan yang timbul pada saat bekerja bisa diatasi oleh klinik kesehatan Pemda Seluma sehingga rutinitas kerja ASN tidak terganggu dan terbengkalai.

2. 2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja Bagian Kesejahteraan Rakyat dapat dikatakan kinerja kegiatan tahun 2024 cukup akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan, karena realisasi dana yaitu Rp. **1.841.208.300.-** sehingga dapat memperoleh capaian kinerja yang baik (86%).

Dari segi efisien, dapat dikatakan cukup efisien karena dengan masukan (Input) dana sebesar Rp. **2.148.800.000.-** dapat menghasilkan keluaran (Output) berupa terjalannya kerukunan antar umat beragama. Bagian Kesejahteraan Rakyat juga bisa memiliki informasi data dari hasil monitoring dan evaluasi kegiatan SKPD terkait.

Dari segi efektivitas, dapat dikatakan cukup efektif karena tujuan program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dapat memberikan hasil positif dalam pengembangan penghayatan nilai-nilai keagamaan dengan terselenggaranya kegiatan ibadah keagamaan (100%) serta manfaat adanya kebersamaan dalam membangun

kehidupan beragama (95%) sehingga memberikan dampak untuk kebebasan memeluk dan menjalankan ibadah masing-masing menurut kepercayaannya (95%).

Begitu juga pada Monitoring dan Evaluasi Kegiatan SKPD dikatakan cukup efektif dengan adanya hasil laporan pada monitoring dan evaluasi kegiatan kesejahteraan rakyat (85%) serta manfaat memiliki data sebagai bahan informasi (85%) dengan dampak yang cukup baik yaitu data yang tersedia semakin akurat (85%).

Dengan hasil indikator kinerja diatas maka dapat dilihat tingkat kinerja yang baik (92%) walaupun tidak secara signifikan karena realisasinya lebih tinggi dari tahun anggaran sebelumnya yang hanya mencapai 80%.

2. 3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi SKPD

Mengacu pada tugas pokok dan fungsi Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma terdiri dari 3 (tiga) Koordinator Bagian yaitu :

1. Koordinator Bagian Bidang Bina Mental Spiritual.
2. Koordinator Bagian Bidang Kesejahteraan Sosial
3. Koordinator Bagian Bidang Kesejahteraan Masyarakat.

Berdasarkan 3 (tiga) bagian tersebut maka Isu – Isu Strategis di Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma terbagi sesuai dengan tiga bagian tersebut yaitu :

1. Koordinator Bagian Bina Mental Spiritual

Bagian Bina Mental Spiritual yang bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas :

1. Merencanakan kegiatan sub bagian bina mental spiritual;
2. Membagi tugas kepada bawahan dilingkungan sub bagian bina mental spiritual;
3. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan sub bagian bina mental spiritual;
4. Menyiapkan data tentang sarana pembinaan mental spiritual;
5. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan yang berhubungan dengan sarana pembinaan mental spiritual;
6. Menyiapkan bahan koordinasi dengan dinas instansi terkait dalam rangka pengembangan sarana pembinaan mental spiritual;
7. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan di bidang sarana pendidikan agama dan pembinaan mental spiritual;
8. Menyiapkan bahan pertimbangan pemberian bahan dibidang sarana pendidikan agama dan pembinaan mental spiritual;
9. Menyiapkan bahan, mengkoordinasikan dan melakukan perumusan kebijakan daerah di bidang lembaga dan kerukunan keagamaan;

10. Menyiapkan dan mengkoordinasikan bahan pedoman pembinaan lembaga keagamaan dan kerukunan umat beragama;
11. Menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi penyelenggaraan dakwah dan kegiatan keagamaan lainnya;
12. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pelaksanaan manasik haji;
13. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pelaksanaan ibadah haji;
14. Menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi penyelenggaraan ibadah haji, mulai dari pendaftaran sampai berangkat ke tanah suci hingga kembali ke daerah;
15. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis tata cara pembinaan kehidupan keragaman dan kerukunan antar umat beragama dan intern antar umat beragama;
16. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan yang berhubungan dengan sarana peribadatan dan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan dibidang sarana peribadatan;
17. Menyiapkan bahan pertimbangan pemberian bantuan dibidang sarana peribadatan;
18. Melaksanakan perayaan hari-hari besar keagamaan;
19. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan perayaan hari-hari besar keagamaan dan perlombaan kegiatan keagamaan;
20. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan lembaga keagamaan (Majelis, Taklim, Kelompok Pengajian dll);
21. Menyusun laporan kegiatan sub bagian bina mental spiritual;
22. Memberi petunjuk, arahan dan bimbingan kepada bawahan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
23. Menilai dan mencatat prestasi kerja dan perilaku kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier; dan
24. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2. Koordinator Bagian Kesejahteraan Sosial

Koordinator Bagian Kesejahteraan Sosial yang bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana dan program kerja sub bagian kesejahteraan sosial;
2. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan kebijakan perencanaan sub bagian kesejahteraan sosial;

3. Menyiapkan bahan pelayanan penyelenggaraan urusan pemerintah dibidang sosial, pendidikan, perpustakaan, komunikasi dan informasi, statistic, persandian, sarana kesehatan, peribadatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
4. Menyiapkan bahan fasilitas pemberian bantuan sosial kepada badan/lembaga ormas, sarana peribadatan, kelompok masyarakat dan individu/keluarga sesuai peraturan perundang-undangan;
5. Melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian bantuan sosial kepada badan/lembaga ormas, sarana peribadatan, kelompok masyarakat dan individu/keluarga sesuai peraturan perundang-undangan;
6. Penanganan, pembinaan dan sosialisasi korban KDRT, Narkoba, HIV, Asusila dan Penyakitmasyarakat lainnya;
7. Melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi program pelayanan kesehatan;
8. Melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi program Usaha Kesehatan Sekolah;
9. Memeriksa hasil kerja bawahan dilingkungan sub bagian kesejahteraan sosial;
10. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada sub bagian kesejahteraan masyarakat;
11. Memberi petunjuk, arahan dan bimbingan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dilingkungan sub bagian kesejahteraan sosial;
12. Menilai dan mencatat prestasi kerja dan perilaku kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier; dan
13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3. Koordinator Bidang Kesejahteraan Masyarakat

Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana dan program kerja sub bagian kesejahteraan masyarakat;
2. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dibagian kesejahteraan masyarakat;
3. Menyiapkan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan pemerintah daerah dibidang pemuda dan olahraga, pariwisata, perhubungan dan ketenagakerjaan;
4. Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dibidang pemuda dan olahraga, pariwisata, perhubungan dan ketenagakerjaan;
5. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintah dibidang pemuda dan olahraga, pariwisata, perhubungan dan ketenagakerjaan;

6. Menyiapkan bahan pelayanan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dibidang pemuda dan olahraga, pariwisata, perhubungan dan ketenagakerjaan;
7. Mengkoordinasikan kerjasama antar lembaga swadaya masyarakat dalam program kesejahteraan masyarakat;
8. Memantau dan mengevaluasi kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan SKPD-SKPD sebagai mitra pelaksana;
9. Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan pada sub bagian kesejahteraan masyarakat;
10. Memeriksa hasil kerja bawahan dilingkungan sub bagian kesejahteraan masyarakat;
11. Melaporkan pelaksanaan kinerja dilingkungan sub bagian kesejahteraan masyarakat;
12. Memberi petunjuk, arahan dan bimbingan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dilingkungan sub bagian kesejahteraan masyarakat;
13. Menilai dan mencatat prestasi kerja dan perilaku kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier; dan
14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2. 4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Sesuai dengan Program Pemerintah Kabupaten Seluma yang telah dicanangkan untuk kurun waktu Tahun 2021 s.d. 2026 membawa Visi : “ MILA BESAMO UNTUK SELUMA ALAP “.

Dalam bahasa Serawai “Mila Besamo Untuk Seluma ALAP” dapat diartikan “Mari Bersama Untuk Seluma Elok”. Untuk Seluma ALAP dapat diartikan “Mari Bersama Untuk Seluma Elok”. Untuk formulasi dari rumusan ALAP tersebut dapat dijabarkan berikut :

Maksud dari **A** adalah **AKSESIBILITAS**

Maksud dari **L** adalah **LAPANGAN KERJA**

Maksud dari **A** adalah **ADAT**

Maksud dari **P** adalah **PEREKONOMIAN**

Hal ini menjadi kerangka acuan yang mendasar terhadap kinerja instansi/dinas, unit/bidang/bagian untuk lebih memperhatikan profil tugas pokok maupun kinerja masing – masing bidang yang sudah tercipta sesuai dengan ketentuan perundang – undangan serta Peraturan Pemerintah Daerah yang tertuang pada inti pelaksanaan pola kerja eksekutif, dengan berlakunya Undang – Undang antara lain :

1. Undang – Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

- 2. Undang – Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagai Perkuatan status dan peran Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota sebagai wujud nyata kesetaraan pembangunan nasional maupun regional.
- 3. Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 07 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Rencana program dan kegiatan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma yang tercantum pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKAPD) 2023 terdiri dari 2 (dua) program yaitu :

- 1. Program penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 2. Program pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat

Kedua program tersebut dilaksanakan dengan 2 Program, 4 (empat) kegiatan 10 (sepuluh) sub kegiatan dan pendanaan/pagu indikatif sejumlah Rp. 2.148.800.000,- (Dua milyar seratus empat puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).

2. 5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja (Renja) bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2024 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah dilaksanakan di dalam arah kebijakan RPJPD Rencana Strategis (Renstra) bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026.

Tabel 4
Kajian Usulan Program dan Kegiatan

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
-	Nihil	-	-	-	-

Usulan program dan kegiatan yang diusulkan dari masyarakat langsung ataupun melalui perwakilannya maupun lewat organisasi masyarakat ke bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma hingga saat ini belum ada.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM KEGIATAN

3. 1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan dengan Tugas Pokok Dan Fungsi Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma, maka Bagian kami melaksanakan fungsi administrasi dengan melakukan pengkoordinasian dengan instansi terkait perihal Pendidikan, Kesehatan, Keagamaan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Sosial.

Dengan adanya bagian administrasi Kesejahteraan Rakyat diharapkan visi dan misi Bupati Kabupaten Seluma yaitu “ MILA BESAMO UNTUK SELUMA ALAP “. dapat terlaksana dengan baik dalam bidang bina mental spiritual, Kesejahteraan Rakyat dan kesejahteraan masyarakat.

3. 2. Tujuan Dan Sasaran Renja SKPD

Berdasarkan Renstra bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2022-2026, maka Bagian Kesejahteraan Rakyat Memiliki Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yaitu :

A. Tujuan yang ingin dicapai yaitu :

1. Peningkatan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan bidang perekonomian, kesejahteraan rakyat dan pembangunan.
2. Meningkatkan tata kelola kinerja SKPD

B. Sasaran yang ingin dicapai antara lain :

1. Meningkatnya pembinaan dan pengkoordinasian penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di bidang perekonomian, kesejahteraan rakyat dan pembangunan
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Seluma.

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2021	Program	Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Peningkatan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan bidang perekonomian, kesejahteraan rakyat dan pembangunan	1. Persentase kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang dimanfaatkan.		Jumlah kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang dimanfaatkan	100%		
		1. Persentase lembaga keagamaan / sosial yang mendapatkan bantuan	Meningkatnya pembinaan dan pengkoordinasian penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di bidang perekonomian, kesejahteraan rakyat dan pembangunan	Jumlah lembaga keagamaan/social yang mendapatkan bantuan	100%	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	1. Kegiatan Fasilitasi kegiatan safari Ramadhan
		2. Jumlah Kegiatan keagamaan rutin yang dilaksanakan setiap tahun		Pelaksanaan kegiatan rutin keagamaan			
2	Meningkatkan Tata Kelola Kinerja SKPD	1. Nilai SAKIP SKPD		Penilaian evaluasi Sakip	100%	Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1. Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan pelaporan keuangan
		1. Nilai Evaluasi SAKIP SKPD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten selama	Penilaian evaluasi Sakip B	100%		

3. 3. Program Dan Kegiatan

Dalam rangka pelaksanaan program kegiatan bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2023 besarnya pagu dana indikatif yang bersumber dari APBD Pemerintah Kabupaten Seluma sebesar **Rp. 2.148.800.000,-** (Dua milyar seratus empat puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dan perkiraan pagu tahun 2025 sebesar Rp. 2.879.679.910,- (Dua milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus sepuluh rupiah).

Uraian rencana Program dan Kegiatan dan pagu dana Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2024 dan prakiraan maju 2025 dapat dilihat pada table 5 berikut ini : (Tabel Terlampir).

Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2024 Memiliki 2 (dua) Program, 4 (empat) Kegiatan dan 10 (sepuluh) Sub Kegiatan Yaitu :

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- 1. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - b. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - c. Fasilitas kunjungan tamu
 - d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 2. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- 3. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

- 1. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
 - a. Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual
 - b. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan sosial
 - c. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan masyarakat

BAB IV
PENUTUP

Dengan memanjatkan Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi kesempatan dan kemampuan untuk menyelesaikan Rencana Kerja Bagian Kesejahteraan Rakyat, Rencana Kerja ini merupakan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat.

Rencana Kerja ini nantinya menjadi dasar Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan atas kinerja SKPD Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2024. Disadari bahwa meskipun ada berbagai macam tantangan yang akan dihadapi dalam pelaksanaan dan pencapaian Rencana Kerja SKPD, ini tapi kami percaya dengan ketulusan hati, kerjakeras, dan dukungan kerja sama dari berbagai pihak baik di Tingkat Kabupaten Seluma maupun seluruh aparat Pemerintah di Lingkungan Kantor Bupati Seluma lebih khusus Bagian Kesejahteraan Rakyat serta keterlibatan berbagai komponen masyarakat yang ada maka apa yang kita cita – citakan bersama akan dapat terwujud yakni “ **KABUPATEN SELUMA YANG TAIS: TERTIB, AMAN, INDAH DAN SEJAHTERA.**

Tais, Desember 2024



Tabel 1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2021-2026
KABUPATEN SELUMA

[illegible]

Tabel 2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SELUMA

[illegible]

Tabel 3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024-2025
KABUPATEN SELUMA

NAMA OPD : BAGIAN KESRA SETDA KAB. SELUMA

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhna					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indicator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indicator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	BAGIAN KESRA					BAGIAN KESRA					
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA										
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bagian Kesra		1 tahun		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bagian Kesra		1 tahun		
	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Bagian Kesra		1 tahun	20.333.960	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Bagian Kesra		1 tahun	20.333.960	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bagian Kesra		1 tahun	13.250.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bagian Kesra		1 tahun	13.250.000	
	Fasilitasi Kunjungan tamu	Bagian Kesra		1 tahun	66.800.000	Fasilitasi Kunjungan tamu	Bagian Kesra		1 tahun	66.800.000	
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Bagian Kesra		1 tahun	45.000.000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Bagian Kesra		1 tahun	45.000.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bagian Kesra		1 tahun	15.000.000	Peyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bagian Kesra		1 tahun	15.000.000	
	Penyediaan Alat Komponen Listrik	Bagian Kesra		1 taun	6.000.000	Penyediaan Komponen Listrik	Bagian Kesra		1 tahun	6.000.000	
	Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah					Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah					
	Penyediaan Jasa surat menyurat	Bagian Kesra		1 tahun	6.000.000	Penyediaan Jasa surat menyurat	Bagian Kesra		1 tahun	6.000.000	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bagian Kesra		1 tahun		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bagian Kesra		1 tahun		
	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah					Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah					
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Bagian Kesra		1 tahun	20.615.950	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Bagian Kesra		1 tahun	20.615.950	
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat					Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat					
	Fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual	Kab. Seluma		1 tahun	2.640.000.000	Fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual	Kab. Seluma		1 tahun	2.640.000.000	
	Pelaksanaan kebijakan, evaluasi, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial	Kab. Seluma		1 tahun	0	Pelaksanaan kebijakan, evaluasi, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial	Kab. Seluma		1 tahun		
	Pelaksanaan kebijakan, evaluasi, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat	Kab. Seluma		1 tahun	0	Pelaksanaan kebijakan, evaluasi, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat	Kab. Seluma		1 tahun	0	

Tabel 5
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA KABUPATEN SELUMA
TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025

NAMA OPD : BAGIAN KESRA SETDA KAB. SELUMA

Kode	Urusan / Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indicator Kinerja Program / Kegiatan	RENCANA TAHUN 2023				Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	BAGIAN KESRA								
	Administrasi Umum Perangkat Daerah								
	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor		Bagian Kesra		19.973.000	APBD			19.979.960
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Bagian Kesra		6.749.450	APBD			6.749.450
	Fasilitasi Kunjungan tamu		Bagian Kesra		12.000.000	APBD			12.000.000
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		Bagian Kesra		21.900.000	APBD			20.000.000
	Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah								
	Penyediaan Jasa surat menyurat		Bagian Kesra		5.000.000	APBD			2.240.000
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Bagian Kesra		6.500.000	APBD			6.500.000
	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah								
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan		Bagian Kesra		16.678.200	APBD			16.678.200
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT								
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat								
	Fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual		Bagian Kesra		2.059.998.390	APBD			2.059.998.390
	Pelaksanaan kebijakan, evaluasi, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial		Bagian Kesra		0	APBD			77.270.000
	Pelaksanaan kebijakan, evaluasi, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat		Bagian Kesra		0	APBD			0